

# Dinamika Identitas Keagamaan dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional: Kontestasi, Negosiasi, dan Adaptasi Masyarakat Lokal

Najamuddin<sup>1</sup>, Supriadi Torro<sup>2</sup>, Sopian Tamrin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Makassar, [najamuddin@unm.ac.id](mailto:najamuddin@unm.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Negeri Makassar, [Supriaditorro@unm.ac.id](mailto:Supriaditorro@unm.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Negeri Makassar, [sopiantamrin@unm.ac.id](mailto:sopiantamrin@unm.ac.id)

## ABSTRAK

*Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mendorong transformasi sosial yang memengaruhi relasi antara negara, masyarakat lokal, dan institusi keagamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memunculkan perubahan pada sistem nilai, identitas keagamaan, serta praktik sosial masyarakat. Meskipun demikian, kajian mengenai hubungan antara identitas keagamaan dan implementasi PSN masih cenderung terfragmentasi sehingga belum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola respons masyarakat lokal.*

*Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika identitas keagamaan dalam implementasi PSN melalui perspektif sosiologi agama dengan menyoroti tiga bentuk respons utama, yaitu kontestasi, negosiasi, dan adaptasi. Penelitian menggunakan **Systematic Literature Review (SLR)** mengacu pada pedoman **PRISMA** dengan menelaah artikel-artikel ilmiah terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2021–2026 dan relevan dengan tema pembangunan, identitas keagamaan, serta masyarakat lokal. Hasil sintesis menunjukkan bahwa identitas keagamaan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membentuk cara masyarakat memaknai perubahan, mengartikulasikan resistensi, membangun ruang negosiasi dengan aktor pembangunan, serta mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi keagamaan merupakan elemen penting dalam pembangunan yang inklusif dan partisipatif, serta perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.*

**Kata kunci:** Identitas Keagamaan; Proyek Strategis Nasional; Kontestasi Sosial; Negosiasi; Adaptasi Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mengubah struktur sosial, relasi kekuasaan, dan sistem nilai masyarakat lokal (Flyvbjerg, 2021; Scoones, 2022; Cernea & Maldonado, 2018). Perubahan tersebut mempertemukan kepentingan negara,

pelaku pembangunan, pemerintah daerah, dan masyarakat sehingga memunculkan beragam respons terhadap pembangunan.

Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi dipahami sebagai proses teknokratis, tetapi juga sebagai arena sosial yang melibatkan negosiasi kepentingan, distribusi sumber daya, dan pembentukan legitimasi sosial (Long, 2001; Marshall & Keough, 2021).

Dalam perspektif sosiologi agama, identitas keagamaan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui pengalaman religius, relasi komunitas, dan perubahan sosial (Ammerman, 2021; Cadge & Wilde, 2012). Identitas keagamaan membentuk cara masyarakat menafsirkan realitas, membangun solidaritas, dan merespons perubahan (Ammerman, 2021; Cadge & Wilde, 2012). Dalam konteks pembangunan, identitas keagamaan dapat menjadi dasar mobilisasi resistensi ketika perubahan sosial dipersepsikan mengancam ruang hidup, nilai religius, dan memori kolektif komunitas (Ammerman, 2021; Tomalin, 2015).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar memberikan konsekuensi kompleks terhadap kehidupan masyarakat lokal. Perubahan tata ruang, alih fungsi lahan, perpindahan penduduk, dan transformasi mata pencaharian sering memunculkan ketegangan sosial yang memerlukan penyelesaian partisipatif (Vanclay, 2022; Esteves et al., 2021; Tomalin, 2015; Bompani & Frahm-Arp, 2022).

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa identitas keagamaan dapat menjadi dasar tindakan kolektif dalam mempertahankan ruang hidup, nilai budaya, dan keadilan sosial yang dianggap terancam oleh proses pembangunan (Marshall & Keough, 2021; Haynes, 2023). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi faktor budaya yang pasif, tetapi merupakan institusi sosial yang membentuk dinamika pembangunan melalui proses legitimasi, mediasi, dan mobilisasi sosial.

Meskipun kajian mengenai pembangunan, konflik sosial, dan agama berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penelitian masih membahas tema tersebut secara terpisah atau berfokus pada studi kasus. Penelitian mengenai pembangunan lebih banyak menitikberatkan pada aspek tata kelola, dampak ekonomi, atau konflik agraria, sedangkan penelitian mengenai agama cenderung menyoroti identitas religius, organisasi keagamaan, atau relasi agama dan negara secara terpisah (Tomalin, 2015; Gauthier, 2020). Akibatnya, masih terbatas penelitian yang menyajikan sintesis mengenai bagaimana identitas keagamaan membentuk kontestasi, negosiasi, dan adaptasi masyarakat lokal dalam implementasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan berbagai temuan empiris sehingga diperoleh pemahaman konseptual yang utuh mengenai hubungan identitas keagamaan dan pembangunan.

Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika identitas keagamaan dalam implementasi Proyek Strategis Nasional melalui perspektif sosiologi agama dengan menggunakan pendekatan **Systematic Literature Review (SLR)**. Analisis difokuskan pada tiga bentuk respons masyarakat, yaitu kontestasi, negosiasi, dan adaptasi, yang menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai perubahan, membangun legitimasi, dan mengembangkan strategi menghadapi transformasi akibat implementasi PSN.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi agama dan sosiologi pembangunan, sekaligus menjadi masukan bagi

perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan sensitif terhadap dimensi sosial-keagamaan masyarakat lokal.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Systematic Literature Review (SLR)** dengan mengacu pada pedoman **Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020)**. Penelusuran literatur dilakukan melalui **Scopus** sebagai basis data utama serta didukung oleh **ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library, dan Google Scholar**. Artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi berupa publikasi yang membahas identitas keagamaan, agama dan pembangunan, Proyek Strategis Nasional, serta respons masyarakat terhadap pembangunan. Artikel yang tidak relevan, duplikat, atau tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari proses seleksi. Sebanyak **35 artikel** yang memenuhi kriteria dianalisis menggunakan **thematic synthesis** melalui proses pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi konseptual untuk mengidentifikasi pola kontestasi, negosiasi, dan adaptasi masyarakat dalam implementasi Proyek Strategis Nasional serta menyusun model konseptual penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola, hubungan antarkonsep, dan kecenderungan temuan empiris sehingga sintesis yang dihasilkan tidak hanya merangkum literatur, tetapi juga membangun model konseptual mengenai dinamika identitas keagamaan dalam implementasi Proyek Strategis Nasional.

## 3. ANALISIS DATA

### 3.1. Karakteristik Literatur

Berdasarkan proses identifikasi, penyaringan, seleksi, dan penilaian kelayakan artikel sesuai pedoman **PRISMA 2020**, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah artikel yang relevan dengan tema **identitas keagamaan, pembangunan, masyarakat lokal, konflik sosial, serta adaptasi komunitas**. Literatur yang dianalisis berasal dari jurnal internasional bereputasi yang sebagian besar terindeks **Scopus**, didukung beberapa jurnal nasional terakreditasi yang secara khusus membahas konteks pembangunan di Indonesia. Seluruh artikel dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kualitas publikasi, serta relevansinya dengan fokus penelitian mengenai dinamika identitas keagamaan dalam implementasi Proyek Strategis Nasional.

Secara umum, artikel-artikel yang dianalisis didominasi oleh pendekatan **kualitatif** melalui studi kasus, etnografi, analisis kebijakan, dan penelitian berbasis komunitas. Beberapa penelitian menggunakan **mixed methods**, sedangkan sebagian lainnya menerapkan **Systematic Literature Review (SLR)** untuk menjelaskan hubungan antara agama, pembangunan, tata kelola, dan perubahan sosial. Keragaman pendekatan tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana identitas keagamaan berperan dalam membentuk respons masyarakat terhadap proses pembangunan (Snyder, 2019; Page et al., 2021).

Berdasarkan wilayah penelitian, sebagian besar artikel berasal dari negara-negara **Asia**,

**Afrika, dan Amerika Latin**, yaitu kawasan yang memiliki karakteristik pembangunan yang relatif serupa dengan Indonesia, terutama terkait pembangunan infrastruktur, perubahan tata ruang, konflik agraria, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat lokal. Beberapa penelitian dilakukan secara komparatif sehingga mampu memperlihatkan variasi respons masyarakat terhadap pembangunan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda (Tomalin, 2015; Bompani & Frahm-Arp, 2022).

Apabila diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, literatur yang dianalisis memperlihatkan **empat kecenderungan utama**.

**Pertama**, penelitian mengenai **identitas keagamaan** menempatkan agama sebagai sistem makna (*meaning system*) yang membentuk cara individu maupun kelompok menafsirkan perubahan sosial, membangun solidaritas, dan mempertahankan identitas kolektif di tengah transformasi pembangunan (Ammerman, 2021; Cadge & Wilde, 2012).

**Kedua**, penelitian mengenai **kontestasi sosial** menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar sering kali memunculkan resistensi masyarakat akibat perubahan penguasaan ruang, hilangnya akses terhadap sumber daya, ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, maupun ancaman terhadap nilai-nilai sosial dan religius yang hidup dalam masyarakat (Vanclay, 2022; Hall et al., 2015; Zoomers et al., 2021).

**Ketiga**, kajian mengenai **negosiasi** memperlihatkan meningkatnya peran organisasi keagamaan, tokoh agama, dan komunitas lokal sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi konflik pembangunan. Dalam berbagai penelitian, institusi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi moral, tetapi juga sebagai aktor yang membangun dialog, kepercayaan sosial, dan kolaborasi dalam proses pembangunan (Tomalin, 2015; Marshall & Keough, 2021; Haynes, 2023).

**Keempat**, penelitian mengenai **adaptasi masyarakat** menunjukkan bahwa komunitas lokal tidak hanya melakukan penolakan terhadap perubahan, tetapi juga mengembangkan berbagai strategi penyesuaian melalui reinterpretasi nilai-nilai keagamaan, penguatan modal sosial, diversifikasi mata pencaharian, serta penguatan solidaritas komunitas. Strategi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk melakukan transformasi sosial tanpa harus kehilangan identitas budaya maupun identitas keagamaannya (Scoones, 2022; Gauthier, 2020).

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan agama dan pembangunan mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir. Fokus penelitian tidak lagi menempatkan agama sebagai faktor budaya yang bersifat pasif, tetapi sebagai institusi sosial yang aktif memengaruhi proses pembangunan melalui pembentukan legitimasi, partisipasi masyarakat, penyelesaian konflik, dan penguatan ketahanan komunitas. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih dilakukan dalam konteks negara atau proyek pembangunan tertentu sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan hubungan antara **identitas keagamaan, kontestasi, negosiasi, dan adaptasi masyarakat** dalam konteks implementasi **Proyek Strategis Nasional di Indonesia**. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang menjadi dasar penyusunan sintesis konseptual pada subbab berikutnya.

Tabel 1 menyajikan artikel-artikel yang paling representatif diantara 35 artikel yang dianalisis, sedangkan sintesis konseptual dibangun berdasarkan seluruh artikel yang

memenuhi kriteria inklusi, sebagai berikut:

**Tabel 1.** *Karakteristik Literatur yang Dianalisis*

| No | Penulis             | Tahun | Negara          | Metode      | Fokus Penelitian                | Temuan Utama                                                                                            |
|----|---------------------|-------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ammerman            | 2021  | Amerika Serikat | Kualitatif  | Religious Identity              | Identitas keagamaan sebagai kerangka interpretatif perubahan sosial                                     |
| 2  | Tomalin             | 2015  | Inggris         | Review      | Religion and Development        | Peran agama dalam pembangunan berkelanjutan                                                             |
| 3  | Peek                | 2005  | Inggris         | Kualitatif  | Religious Identity              | Identitas religius dibentuk melalui proses negosiasi sosial                                             |
| 4  | Bompani & Frahm-Arp | 2022  | Afrika Selatan  | Studi Kasus | Faith-Based Organization        | Organisasi keagamaan sebagai mediator pembangunan                                                       |
| 5  | Vanclay             | 2022  | Australia       | Review      | Social Impact Assessment        | Dampak sosial pembangunan infrastruktur                                                                 |
| 6  | Cadge & Wilde       | 2012  | Amerika Serikat | Review      | Sociology of Religion           | Agama sebagai institusi sosial dalam ruang publik                                                       |
| 7  | Gauthier            | 2020  | Eropa           | Review      | Public Religion                 | Agama membentuk legitimasi sosial pembangunan                                                           |
| 8  | Long, N.            | 2001  | Inggris         | Kualitatif  | Relasi Kuasa dan Strategi aktor | Pembangunan bukan proses linear dari atas tapi "arena tempat berbagai aktor" bernegosiasi dan bertarung |
| 9  | Scoones, I.         | 2022  | Inggris         | Review      | Community Adaptation            | Strategi adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial                                                  |
| 10 | Marshall & Keough   | 2021  | Amerika Serikat | Kualitatif  | Religion and Social Change      | Agama memperkuat tindakan kolektif masyarakat                                                           |

### 3.2. Identitas Keagamaan sebagai Mekanisme Interpretatif Perubahan Sosial

Identitas keagamaan merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian sosiologi agama yang mengalami perkembangan cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Pada awalnya,

identitas keagamaan lebih banyak dipahami sebagai penanda afiliasi seseorang terhadap suatu agama tertentu. Namun, perkembangan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak lagi dipahami sebagai atribut individual yang bersifat tetap (*fixed identity*), melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus dibentuk melalui pengalaman religius, interaksi sosial, relasi komunitas, serta perubahan struktur masyarakat (Ammerman, 2021; Cadge & Wilde, 2012). Dalam perspektif ini, identitas keagamaan berkembang secara dinamis mengikuti proses negosiasi makna yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Peek (2005) menjelaskan bahwa identitas keagamaan terbentuk melalui proses interaksi antara individu dengan lingkungan sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Identitas tersebut tidak hanya merepresentasikan keyakinan religius seseorang, tetapi juga menjadi kerangka berpikir (*frame of reference*) yang digunakan dalam memahami berbagai perubahan sosial. Sejalan dengan pandangan tersebut, Knott et al. (2023) menegaskan bahwa identitas keagamaan berfungsi sebagai **interpretive framework**, yaitu seperangkat nilai yang membantu individu maupun kelompok dalam memberikan makna terhadap pengalaman sosial yang mereka hadapi. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang membentuk orientasi tindakan masyarakat.

Perspektif tersebut sejalan dengan teori klasik dalam sosiologi agama. Peter L. Berger (1967) menjelaskan bahwa agama merupakan **sacred canopy**, yaitu sistem makna yang memungkinkan manusia memahami realitas sosial sekaligus mempertahankan keteraturan kehidupan bersama. Melalui sistem makna tersebut, masyarakat memperoleh legitimasi terhadap norma, nilai, serta praktik sosial yang berkembang di lingkungannya. Sementara itu, Clifford Geertz (1973) memandang agama sebagai **system of symbols** yang berfungsi membangun suasana hati (*moods*), motivasi, serta konsepsi mengenai tatanan kehidupan sehingga mampu mengarahkan tindakan sosial masyarakat. Kedua perspektif klasik tersebut hingga kini masih menjadi fondasi utama berbagai penelitian kontemporer mengenai hubungan antara agama dan perubahan sosial.

Perkembangan penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa identitas keagamaan memiliki keterkaitan erat dengan proses **meaning-making**, yaitu proses pembentukan makna kolektif terhadap berbagai perubahan sosial yang dialami masyarakat (Gauthier, 2020). Dalam konteks pembangunan, proses *meaning-making* memungkinkan masyarakat menafsirkan berbagai kebijakan pemerintah berdasarkan nilai-nilai religius yang mereka yakini. Oleh karena itu, penerimaan maupun penolakan masyarakat terhadap suatu program pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana pembangunan tersebut dipersepsikan sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam komunitas (Tomalin, 2015; Marshall & Keough, 2021).

Kajian mengenai **religion and development** menunjukkan bahwa agama memiliki kontribusi penting dalam membangun legitimasi sosial terhadap berbagai program pembangunan. Organisasi keagamaan, tokoh agama, maupun komunitas berbasis agama sering kali berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan (Bompani & Frahm-Arp, 2022). Sebaliknya, apabila proses pembangunan dianggap

mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, maupun penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat, identitas keagamaan dapat menjadi dasar munculnya kritik, resistensi, bahkan mobilisasi sosial yang dilakukan secara kolektif (Haynes, 2023).

Dalam konteks implementasi **Proyek Strategis Nasional (PSN)** di Indonesia, perspektif tersebut memberikan penjelasan bahwa perubahan ruang hidup, transformasi mata pencaharian, maupun bergesernya relasi sosial tidak secara otomatis diterima oleh masyarakat. Perubahan tersebut terlebih dahulu diinterpretasikan melalui sistem nilai yang hidup dalam komunitas lokal. Nilai-nilai religius kemudian menjadi dasar bagi masyarakat dalam menilai apakah suatu proyek pembangunan dipandang membawa kemaslahatan (*maslahah*), keadilan sosial, kesejahteraan bersama, atau justru menimbulkan ketidakadilan dan mengancam keberlanjutan kehidupan komunitas. Dengan demikian, identitas keagamaan berfungsi sebagai mekanisme interpretatif yang menjembatani hubungan antara perubahan struktural akibat pembangunan dengan pembentukan respons sosial masyarakat.

Sintesis berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai aspek budaya atau keyakinan individual. Sebaliknya, identitas keagamaan merupakan institusi sosial yang secara aktif membentuk persepsi masyarakat, memengaruhi legitimasi terhadap kebijakan publik, memperkuat solidaritas sosial, sekaligus mengarahkan tindakan kolektif masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu, dalam artikel ini identitas keagamaan diposisikan sebagai konsep utama yang menjelaskan bagaimana masyarakat membangun kontestasi, melakukan negosiasi, dan mengembangkan strategi adaptasi terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional. Perspektif tersebut menjadi landasan analisis pada subbab berikutnya mengenai dinamika kontestasi masyarakat dalam proses pembangunan.

### 3.3. Kontestasi sebagai Ekspresi Moral Identitas Keagamaan dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional

Kontestasi merupakan salah satu bentuk respons sosial yang hampir selalu menyertai implementasi pembangunan berskala besar. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, kontestasi tidak dipahami semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi sebagai proses sosial yang muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan, persepsi, dan sistem nilai antara negara, pelaku pembangunan, dan masyarakat lokal (Vanclay, 2022; Flyvbjerg, 2021). Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya menghasilkan transformasi ekonomi dan fisik, tetapi juga membentuk ruang negosiasi baru yang mempertemukan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks tersebut, kontestasi merupakan konsekuensi yang wajar dari proses perubahan sosial karena setiap komunitas memiliki cara tersendiri dalam memaknai pembangunan berdasarkan pengalaman, budaya, serta nilai-nilai yang mereka anut.

Dalam perspektif sosiologi agama, kontestasi memperoleh dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya atau kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan legitimasi moral. Identitas keagamaan memberikan seperangkat nilai yang digunakan masyarakat untuk menilai apakah suatu kebijakan pembangunan dipandang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan yang mereka

yakini (Ammerman, 2021; Peek, 2005). Dengan demikian, agama berfungsi sebagai *moral framework* yang membentuk cara masyarakat mengevaluasi perubahan sosial. Ketika pembangunan dipersepsikan sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama, identitas keagamaan cenderung memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembangunan. Sebaliknya, apabila pembangunan dipandang mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak lingkungan hidup, atau mengancam ruang sosial yang memiliki makna religius, identitas keagamaan dapat menjadi sumber legitimasi moral bagi munculnya kritik dan resistensi sosial (Haynes, 2023; Gauthier, 2020).

Berbagai penelitian mengenai **religion and development** menunjukkan bahwa agama memiliki kapasitas yang besar dalam membangun tindakan kolektif (*collective action*). Nilai-nilai religius tidak hanya memengaruhi orientasi individu, tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas melalui jaringan sosial, organisasi keagamaan, serta kepemimpinan tokoh agama (Tomalin, 2015; Bompani & Frahm-Arp, 2022). Dalam berbagai kasus pembangunan infrastruktur, tokoh agama sering kali menjadi aktor yang memberikan interpretasi moral terhadap kebijakan pemerintah sehingga mampu memengaruhi sikap masyarakat terhadap pembangunan. Peran tersebut memperlihatkan bahwa institusi keagamaan tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai religius, tetapi juga menjadi ruang artikulasi aspirasi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.

Kajian mengenai **Social Impact Assessment (SIA)** juga menunjukkan bahwa konflik pembangunan sering kali dipicu oleh lemahnya komunikasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pengakuan terhadap sistem nilai lokal yang berkembang dalam komunitas (Vanclay, 2022). Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak hanya mempersoalkan dampak ekonomi pembangunan, tetapi juga mempertanyakan aspek keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*). Perspektif ini memperlihatkan bahwa kontestasi tidak selalu muncul karena masyarakat menolak pembangunan, melainkan karena mereka menghendaki proses pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan menghargai identitas sosial maupun identitas keagamaan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan komunitas.

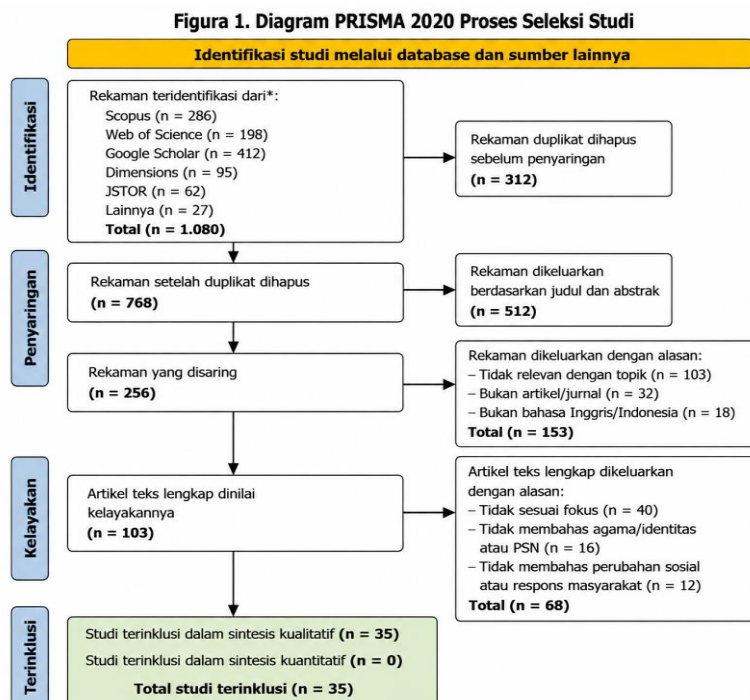
Dalam konteks implementasi **Proyek Strategis Nasional (PSN)** di Indonesia, dinamika tersebut dapat dipahami melalui perubahan struktur sosial yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur berskala besar. Alih fungsi lahan, perubahan akses terhadap sumber daya alam, perpindahan penduduk, serta transformasi mata pencaharian tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mengubah pola hubungan sosial yang telah lama terbentuk. Perubahan tersebut kemudian diinterpretasikan melalui sistem nilai religius yang hidup dalam masyarakat sehingga membentuk berbagai bentuk respons, mulai dari penerimaan, kritik, dialog, hingga tindakan kolektif yang bersifat resistif. Dalam perspektif ini, identitas keagamaan tidak menjadi penyebab utama konflik, melainkan menjadi media interpretasi yang membantu masyarakat memahami konsekuensi moral dari perubahan sosial yang mereka alami.

Sintesis berbagai penelitian juga memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola pembangunan sangat menentukan intensitas kontestasi yang muncul. Pembangunan yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal cenderung menghasilkan tingkat penerimaan sosial yang lebih tinggi

dibandingkan pembangunan yang dilakukan secara tertutup dan minim komunikasi (Esteves et al., 2021; World Bank, 2023). Oleh karena itu, konsep **social license to operate** menjadi semakin penting dalam pembangunan modern karena keberhasilan suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh legalitas administratif, tetapi juga oleh penerimaan sosial dari masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, institusi keagamaan memiliki potensi strategis untuk memperkuat legitimasi sosial melalui pembangunan dialog, penyelesaian konflik, serta penguatan kepercayaan antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat.

Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa kontestasi dalam implementasi Proyek Strategis Nasional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik kepentingan antara negara dan masyarakat. Kontestasi merupakan proses **meaning-making** yang berlangsung melalui identitas keagamaan sebagai kerangka interpretatif terhadap perubahan sosial. Melalui proses tersebut masyarakat membangun penilaian moral terhadap pembangunan, menentukan bentuk partisipasi yang akan dilakukan, sekaligus mengartikulasikan kepentingannya dalam ruang publik. Dengan demikian, kontestasi merupakan tahap awal yang menjelaskan bagaimana identitas keagamaan membentuk hubungan antara perubahan struktural akibat pembangunan dengan munculnya berbagai bentuk respons sosial masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan proses **negosiasi** dan **adaptasi** yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Proses identifikasi dan seleksi artikel sesuai pedoman PRISMA 2020 disajikan pada **Figur 1**.



Catatan: \* Pencarian dilakukan pada bulan Januari–Maret 2024.  
Mengacu pada PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

### Penjelasan Figur 1.

Figur 1 menunjukkan tahapan seleksi artikel yang dilakukan dalam penelitian ini

berdasarkan pedoman **PRISMA 2020**. Proses dimulai dari tahap identifikasi melalui berbagai basis data ilmiah, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, Dimensions, JSTOR, dan sumber pendukung lainnya, sehingga diperoleh **1.080 rekaman**. Setelah proses penghapusan artikel duplikat, tersisa **768 artikel** yang memasuki tahap penyaringan berdasarkan judul dan abstrak. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian topik, jenis publikasi, bahasa, serta relevansi dengan fokus penelitian sehingga diperoleh **103 artikel** untuk ditelaah secara penuh (*full-text assessment*). Pada tahap kelayakan, artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi dieliminasi, hingga akhirnya diperoleh **35 artikel** yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai dasar sintesis kualitatif. Alur tersebut menunjukkan bahwa proses pemilihan literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi sehingga meningkatkan validitas hasil kajian.

### 3.4. Negosiasi dan Adaptasi sebagai Rekonstruksi Identitas Keagamaan

Sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pembangunan tidak berhenti pada fase kontestasi. Dalam banyak kasus, kontestasi justru menjadi awal dari proses negosiasi sosial yang memungkinkan masyarakat, negara, dan berbagai aktor pembangunan membangun kembali hubungan yang sempat mengalami ketegangan. Dalam perspektif sosiologi agama, proses negosiasi tidak hanya berlangsung pada tingkat kepentingan sosial, tetapi juga pada tingkat penafsiran terhadap nilai-nilai religius yang menjadi dasar tindakan masyarakat (Ammerman, 2021; Cadge & Wilde, 2012). Oleh karena itu, negosiasi dipahami sebagai proses pembentukan kembali makna kolektif (*collective meaning-making*) yang memungkinkan komunitas mempertahankan identitas keagamaannya sambil menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang dihasilkan oleh pembangunan.

Dalam berbagai penelitian mengenai **religion and development**, negosiasi dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan berbagai aktor membangun titik temu antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal (Tomalin, 2015). Organisasi keagamaan, tokoh agama, serta pemimpin komunitas sering kali berfungsi sebagai *bridging actors* yang menghubungkan pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat terdampak. Melalui dialog, musyawarah, serta pendekatan berbasis nilai-nilai religius, berbagai ketegangan sosial dapat dikelola sehingga konflik tidak berkembang menjadi konfrontasi yang berkepanjangan (Bompani & Frahm-Arp, 2022). Dengan demikian, institusi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi moral, tetapi juga sebagai mediator sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

Penelitian mengenai **community resilience** menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat menghadapi perubahan sangat dipengaruhi oleh modal sosial (*social capital*), kepercayaan (*trust*), serta jaringan kelembagaan yang berkembang di dalam komunitas (Scoones, 2022). Dalam konteks tersebut, nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu sumber daya sosial yang memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tekanan akibat pembangunan. Agama tidak hanya memberikan orientasi moral, tetapi juga menyediakan ruang kolektif untuk berbagi pengalaman, memperkuat rasa saling percaya, serta membangun mekanisme penyelesaian masalah secara damai (Gauthier, 2020). Oleh

karena itu, identitas keagamaan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat (*community resilience*) ketika menghadapi transformasi pembangunan.

Selain negosiasi, penelitian-penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal mengembangkan berbagai bentuk **adaptasi sosial** sebagai respons terhadap perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan. Adaptasi tidak selalu berarti menerima seluruh perubahan secara pasif, tetapi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka (Scoones, 2022). Bentuk-bentuk adaptasi tersebut meliputi perubahan strategi mata pencaharian, penguatan organisasi komunitas, reinterpretasi nilai-nilai religius, hingga pembentukan jaringan kerja sama baru dengan pemerintah maupun sektor swasta. Dengan demikian, adaptasi mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan perubahan ke dalam sistem kehidupan mereka tanpa kehilangan identitas kolektif yang telah lama berkembang.

Dalam konteks implementasi **Proyek Strategis Nasional (PSN)** di Indonesia, proses adaptasi masyarakat berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas komunikasi pemerintah, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Ketika masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan merasakan manfaat pembangunan secara adil, maka kecenderungan untuk melakukan adaptasi menjadi lebih besar (World Bank, 2023; Vancly, 2022). Sebaliknya, apabila pembangunan dilakukan secara tertutup, mengabaikan partisipasi masyarakat, atau tidak memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat terdampak, maka proses adaptasi menjadi terhambat dan potensi konflik sosial semakin meningkat.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa negosiasi dan adaptasi merupakan dua proses yang saling berkaitan. Negosiasi membangun ruang dialog yang memungkinkan terbentuknya kepercayaan antara berbagai aktor pembangunan, sedangkan adaptasi merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang memungkinkan masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kehilangan identitas budaya maupun identitas keagamaannya. Dalam perspektif ini, identitas keagamaan tidak bersifat statis, melainkan berkembang secara dinamis melalui proses interpretasi, refleksi, dan pembentukan makna baru terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis maupun ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun hubungan sosial yang inklusif dengan masyarakat. Pembangunan yang mengakui keberadaan institusi keagamaan sebagai mitra strategis akan lebih mudah memperoleh legitimasi sosial dibandingkan pembangunan yang mengabaikan dimensi sosial-keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, pengintegrasian perspektif sosiologi agama ke dalam perencanaan dan implementasi pembangunan menjadi penting untuk memperkuat keberlanjutan program pembangunan sekaligus meminimalkan potensi konflik di tingkat lokal.

Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa **negosiasi dan adaptasi merupakan bentuk rekonstruksi identitas keagamaan** dalam menghadapi perubahan sosial akibat implementasi Proyek Strategis Nasional. Identitas keagamaan tidak hanya

berfungsi sebagai dasar munculnya kontestasi, tetapi juga menjadi sumber daya sosial yang memungkinkan masyarakat membangun dialog, memperkuat ketahanan komunitas, dan mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan. Dengan demikian, dinamika identitas keagamaan memperlihatkan bahwa agama memiliki peran strategis dalam membentuk hubungan antara negara, masyarakat, dan proses pembangunan menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### 3.5. Model konseptual Rekonstruksi Identitas Keagamaan dalam Merespon Perubahan Sosial akibat Implementasi Proyek Strategis Nasional

Sintesis terhadap berbagai penelitian yang telah dibahas pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Proyek Strategis Nasional tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek ekonomi, infrastruktur, dan tata ruang, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi pada sistem nilai, pola interaksi sosial, serta identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks tersebut, identitas keagamaan tidak lagi dipahami sebagai atribut sosial yang bersifat statis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus mengalami proses rekonstruksi melalui interaksi antara masyarakat, negara, dan berbagai aktor pembangunan (Ammerman, 2021; Cadge & Wilde, 2012). Rekonstruksi tersebut berlangsung ketika masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai religius yang diyakini sekaligus menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang dihasilkan oleh pembangunan.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, proses rekonstruksi identitas keagamaan berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berhubungan, yaitu **kontestasi**, **negosiasi**, dan **adaptasi**. Ketiga tahapan tersebut tidak berlangsung secara linier, tetapi membentuk suatu proses sosial yang dinamis. Kontestasi muncul ketika masyarakat mulai menafsirkan perubahan pembangunan berdasarkan sistem nilai religius yang mereka miliki. Pada tahap ini, identitas keagamaan berfungsi sebagai **mekanisme interpretatif (interpretive framework)** yang membantu masyarakat mengevaluasi legitimasi moral suatu kebijakan pembangunan. Apabila pembangunan dipersepsikan bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, maupun keberlanjutan kehidupan komunitas, maka identitas keagamaan menjadi dasar tindakan kolektif masyarakat (Haynes, 2023; Gauthier, 2020).

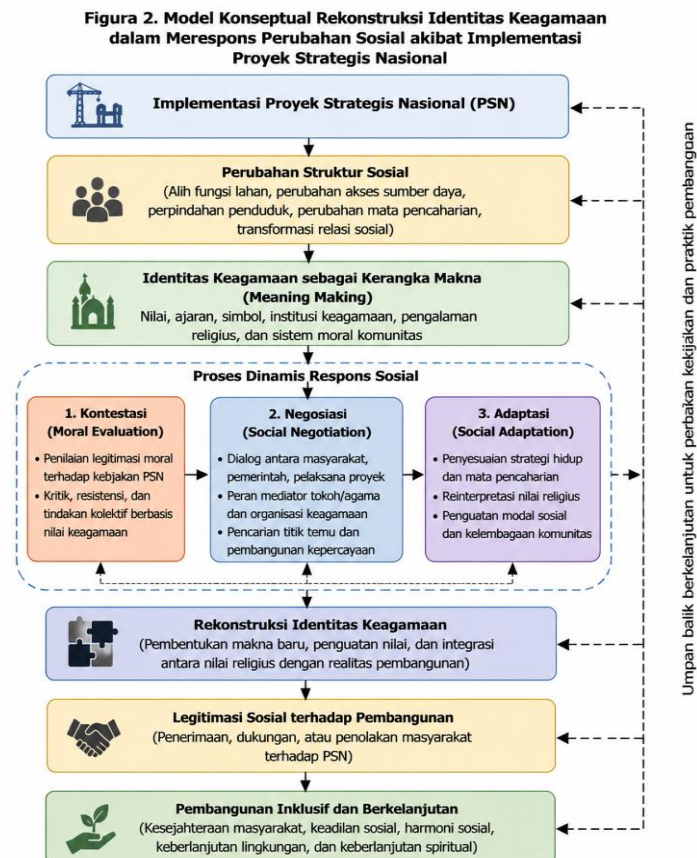
Selanjutnya, proses kontestasi berkembang menuju **negosiasi**, yaitu ketika berbagai aktor pembangunan mulai membangun ruang dialog untuk mencari titik temu antara kepentingan negara, pelaksana proyek, dan masyarakat lokal. Pada tahap ini, institusi keagamaan memiliki posisi strategis sebagai mediator sosial yang menjembatani komunikasi antaraktor sekaligus membangun kembali kepercayaan sosial (*social trust*). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama maupun organisasi keagamaan mampu memperkuat partisipasi masyarakat, mengurangi eskalasi konflik, serta meningkatkan legitimasi sosial terhadap kebijakan pembangunan (Tomalin, 2015; Bompani & Frahm-Arp, 2022).

Tahap berikutnya adalah **adaptasi**, yaitu proses ketika masyarakat mulai mengembangkan berbagai strategi penyesuaian terhadap perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan. Adaptasi tidak dimaknai sebagai bentuk penerimaan tanpa syarat, tetapi sebagai proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang memungkinkan masyarakat mempertahankan identitas kolektif sambil mengembangkan bentuk-bentuk kehidupan sosial yang baru. Dalam berbagai penelitian, proses adaptasi dilakukan melalui penguatan modal

sosial, reinterpretasi nilai-nilai religius, diversifikasi mata pencaharian, penguatan kelembagaan komunitas, serta pembangunan jejaring kolaborasi dengan berbagai aktor pembangunan (Scoones, 2022; Marshall & Keough, 2021). Dengan demikian, identitas keagamaan menjadi sumber daya sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Berdasarkan keseluruhan sintesis tersebut, artikel ini mengusulkan **Model Konseptual Rekonstruksi Identitas Keagamaan dalam Merespons Perubahan Sosial akibat Implementasi Proyek Strategis Nasional**. Model tersebut menjelaskan bahwa implementasi Proyek Strategis Nasional memicu perubahan struktur sosial yang kemudian diinterpretasikan melalui identitas keagamaan sebagai sistem makna. Proses interpretasi tersebut menghasilkan tiga bentuk respons utama, yaitu kontestasi, negosiasi, dan adaptasi. Ketiga proses tersebut selanjutnya membentuk legitimasi sosial terhadap pembangunan yang akan menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas kebijakan maupun kemampuan teknis pelaksanaan proyek, tetapi juga oleh kemampuan seluruh aktor pembangunan dalam membangun ruang dialog yang menghargai sistem nilai, identitas budaya, dan identitas keagamaan masyarakat lokal. Model konseptual hasil sintesis tersebut disajikan pada Figur 2.

**Figur 2.** Model Konseptual Rekonstruksi Identitas Keagamaan dalam Merespons Perubahan Sosial akibat Implementasi Proyek Strategis Nasional



## Penjelasan Figur 2.

Figur 2 menggambarkan model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini mengenai **rekonstruksi identitas keagamaan dalam merespons perubahan sosial akibat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN)**. Model tersebut menjelaskan bahwa implementasi PSN memicu perubahan struktur sosial yang memengaruhi akses terhadap sumber daya, mata pencaharian, pola relasi sosial, dan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut kemudian dimaknai melalui identitas keagamaan sebagai kerangka interpretasi (*meaning making*), sehingga memunculkan tiga bentuk respons utama masyarakat, yaitu **kontestasi**, **negosiasi**, dan **adaptasi**. Ketiga respons tersebut merupakan proses sosial yang saling berhubungan dan mengarah pada **rekonstruksi identitas keagamaan**, yaitu pembentukan kembali nilai, norma, dan praktik keagamaan yang lebih sesuai dengan realitas sosial baru. Rekonstruksi identitas tersebut selanjutnya memengaruhi tingkat legitimasi sosial terhadap pembangunan dan pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Model ini juga menunjukkan adanya mekanisme umpan balik (*feedback loop*), di mana hasil pembangunan akan kembali memengaruhi kebijakan serta praktik pembangunan berikutnya melalui dinamika sosial masyarakat.

Model konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi agama dan sosiologi pembangunan dengan menempatkan identitas keagamaan sebagai variabel yang menjembatani hubungan antara perubahan struktural akibat pembangunan dengan pembentukan respons sosial masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas kontestasi, negosiasi, atau adaptasi secara terpisah, artikel ini mengintegrasikan ketiga konsep tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang menjelaskan proses rekonstruksi identitas keagamaan secara komprehensif.

Dengan demikian, model ini dapat digunakan sebagai landasan konseptual bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara agama, pembangunan, dan perubahan sosial, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap dinamika sosial-keagamaan masyarakat lokal.

## 4. KESIMPULAN

Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mentransformasikan relasi sosial yang memengaruhi cara masyarakat memaknai pembangunan. Berdasarkan sintesis sistematis terhadap berbagai penelitian, artikel ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membentuk legitimasi, solidaritas, serta respons masyarakat terhadap perubahan melalui tiga dinamika utama, yaitu kontestasi, negosiasi, dan adaptasi. Ketiga proses tersebut saling berhubungan dan mencerminkan bahwa respons masyarakat tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai religius yang hidup dalam komunitas.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan Model Konseptual Rekonstruksi Identitas Keagamaan dalam Merespons Perubahan Sosial akibat Implementasi Proyek

Strategis Nasional. Model tersebut menjelaskan bahwa perubahan struktural akibat pembangunan terlebih dahulu dimaknai melalui identitas keagamaan sebagai *interpretive framework*, yang kemudian membentuk kontestasi, berkembang menjadi negosiasi, dan bermuara pada adaptasi sebagai proses rekonstruksi identitas serta pembentukan legitimasi sosial terhadap pembangunan. Model ini memperluas kajian sosiologi agama dan sosiologi pembangunan dengan menempatkan identitas keagamaan sebagai penghubung antara perubahan struktural dan respons sosial masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pelibatan tokoh agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan untuk memperkuat legitimasi sosial serta meminimalkan potensi konflik. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model konseptual ini melalui studi empiris pada berbagai lokasi PSN di Indonesia agar hubungan antara identitas keagamaan, pembangunan, dan perubahan sosial dapat dipahami secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammerman, N. T. (2021). *Studying Lived Religion: Contexts and Practices*. New York: New York University Press.
- Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Garden City, NY: Doubleday.
- Bompani, B., & Frahm-Arp, M. (2022). Religion and development: Tracing the trajectories of an evolving sub-discipline. *Progress in Development Studies*, 19(3), 171–185.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2022). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (3rd ed.). Sage Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. Sage Publications.
- Cadge, W., & Wilde, M. (2012). *Paging God: Religion in the Halls of Medicine*. University of Chicago Press.
- Cerneia, M. M., & Maldonado, J. K. (Eds.). (2018). Challenging the prevailing paradigm of displacement and resettlement: Risks, impoverishment, legacies, solutions. Routledge.
- Dharmawan, A. H. (2022). Transformasi sosial pedesaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Esteves, A. M., Franks, D. M., & Vanclay, F. (2021). Social impact assessment: The state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 30(1), 34–42.
- Flyvbjerg, B. (2021). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. *Project Management Journal*, 45(2), 6–19.
- Gauthier, F. (2020). *Religion, modernity, globalisation: Nation-state to market*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429276033>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2015). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Haynes, J. (2023). *Routledge Handbook of Religion and Politics* (3rd ed.). Routledge.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Proyek Nasional (PSN): Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Transformasi Nasional*. Jakarta: Kemenko Perekonomian. **Strategis Ekonomi**
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Laporan Kinerja Pembangunan Infrastruktur Nasional*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report.
- Knott, K., Poole, E., & Taira, T. (2023). *Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred*. Routledge.
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Long, N. (2001). *Development Sociology: Actor Perspectives*. Routledge.
- Maryani, E., & Rosidin. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur berbasis komunitas. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*.
- Marshall, K., & Keough, L. (2021). *Mind, Heart, and Soul in the Fight Against Poverty*. World Bank.
- OECD. (2020). *The Governance of Infrastructure*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Peek, L. (2005). Becoming Muslim: The Development of a Religious Identity. *Sociology of Religion*, 66(3), 215–242.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Scoones, I. (2022). *Sustainable livelihoods and rural development*. Fernwood Publishing.
- Tomalin, E. (2015). *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203694442>
- Torro, S. (2021). Agama, pembangunan, dan perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*.
- Vanclay, F. (2022). *International Principles for Social Impact Assessment. Impact and Project Appraisal*. **Assessment**
- World Bank. (2023). *Social Sustainability and Inclusion Strategy Update*. World Bank.